

PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL PADA CYBERGAMBLING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA

Oleh : Rio Dwiky Perwira¹ dan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan dari pelaksanaan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan transnasional *cybergambling* di Indonesia, penelitian ini sekaligus bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana modus operandi *cybergambling* transnasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative-empiris dimana penelitian dilakukan dengan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh dari pengamatan terlibat serta wawancara terhadap responden. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah **Pertama**, perkembangan modus operandi perjudian online selalu berkembang dari waktu ke waktu dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, di era sekarang perjudian telah berubah dari perjudian yang bersifat tradisional dan konvensional yang harus dilakukan dengan cara bertemu, berinteraksi dan bertatap muka menjadi perjudian yang tanpa adanya batasan tempat, tanpa batasan waktu, tanpa bertatap muka dan dapat menggunakan mata uang apapun. **Kedua**, penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam *cybergambling* oleh Indonesia dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral dan multilateral melalui ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik masalah pidana selama tidak bertentangan dengan asas kriminalitas ganda dengan negara yang diminta.

Kata kunci: Yurisdiksi Ekstrateritorial, Modus Operandi, Perjudian, Kejahatan Transnasional dan *Cybergambling*

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF EXTRATERITORIAL JURISDICTION IN CYBERGAMBLING AS A TRANSNATIONAL CRIME IN INDONESIA

By: Rio Dwiky Perwira³ and Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.⁴

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the application of the Application of the principle of extraterritorial jurisdiction as regulated in Article 2 of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 on the Electronic Information and Transactions on transnational cyberspace crime in Indonesia, this study also aims to find out and understand how the transnational cybergambling modus operandi.

This research is a normative-empirical legal research where research is carried out with data obtained through library studies and field research obtained from observations involved and interview respondents. The data obtained is then processed and analyzed descriptively and qualitatively.

*The conclusion of this study is **First**, the evolution of the online gambling modus operandi is constantly evolving from time to time and changes along with the times, in the present era gambling has changed from traditional and conventional gambling to meet, interact and face to face become gambling without any place restrictions, without time limits, without face to face and can use any currency. **Second**, the application of the principle of extraterritorial jurisdiction in cybergambling in Indonesia can be carried out through bilateral and multilateral agreements through extradition and mutual legal assistance on criminal matters as long as they do not have conflict with the principle of double criminality with the requested country.*

Keywords: Extraterritorial Jurisdiction, Modus Operandi, Gambling, Transnational Crime and Cybergambling

³ Student of Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Criminal Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University.